PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EKO PURNAMA SAKTI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **744813**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 727.350.000**

1. Tanah Seluas 456 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 22.800.000
2. Tanah Seluas 491 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 24.550.000
3. Tanah Seluas 9.682 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , Rp. 80.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
7. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 8.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO 225CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 186.030.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 226.554.107**

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**185.999.493**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.333.933.600**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**182.504.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.151.429.600**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.